

PROSES INTEGRASI IRIAN BARAT KE DALAM NKRI ¹

Oleh : RYCHO KORWA²

ABSTRAK

Salah satu esensi kemerdekaan bagi suatu bangsa adalah terbebas dari ketertindasan (penjajahan), karena kemerdekaan memiliki nilai positif bagi keberlangsungan kehidupan suatu negara bangsa. Sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat dan dilatarbelakangi oleh keanekaragaman suku, ras, budaya dan lain-lain adalah suatu kenyataan logis yang membentuk identitas keindonesiaan. Oleh sebabnya menggalang nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam merajut keindonesiaan adalah hal yang mutlak dan sangat penting mendapatkan perhatian serius dari setiap komponen anak bangsa, sebab bila tidak, hasrat persatuan dan kesatuan yang digaungkan dalam "Bhineka Tunggal Ika" yang sebagai andagium pemersatu bangsa sekaligus sebagai tiang penyangga eksistensi kedaulatan NKRI "mungkin" akan tinggal kenangan apabila peristiwa-peristiwa sejarah yang melatarbelakanginya tidak dipahami dengan baik, karena keberadaan suatu Negara-bangsa yang dilatari oleh peristiwa-peristiwa sejarah masa lalu akan memberikan corak tersendiri bagi dinamika keberlangsungan kehidupan bangsa itu.

Adapun maksud dilakukannya penelitian tentang "Proses Integrasi Irian Barat ke dalam NKRI" dilatarbelakangi lebih kepada fakta empiris di Papua bahwa walaupun wilayah Irian Barat atau yang sekarang kita kenal dengan nama Papua adalah bagian dari wilayah kedaulatan RI semenjak berintegrasi pada waktu silam, namun tuntutan akan pemisahan diri dari sebagian atau sekelompok orang Papua untuk terpisah dari NKRI dan membentuk sebuah Negara baru masih terdengar jelas ditelinga kita hingga sekarang

Atas urgensi pemikiran ini, penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu kajian terkait "Proses Integrasi Irian Barat ke dalam NKRI, dimana tema ini juga merupakan salah satu dari sekian banyak peristiwa yang melatarbelakangi terbentuknya identitas keindonesiaan.

Kata Kunci : Integrasi, Papua Barat, NKRI

PENDAHULUAN

Sejarah mencatat bahwa, Proses Integrasi Irian Barat ke Dalam NKRI tidak terlepas dari berbagai persoalan dan konflik yang terjadi antara Indonesia dan Belanda yg pada saat itu masih menguasai Irian (Papua). Dalam perjuangan guna mencapai

¹ Merupakan Skripsi Penulis pada Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

² Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

tujuan masing-masing pihak, beberapa perundingan pun telah dilalui antara Indonesia dan Belanda yang dimulai pada suatu perundingan yg kita kenal sebagai Konferensi Meja Bundar (1949) hingga sampai kepada New York Agreement (1962) yang menjadi titik terang Integrasi Irian Barat masuk ke Indonesia.

Dari carut-marutnya pertentangan Belanda dan Indonesia, kemerdekaan yang di usung Belanda bagi Papua (Irian Barat) dikala itu mempunyai dampak tersendiri bagi masyarakat Papua hingga kini, sehingga protes pun selalu dilayangkan (Pro Papua Merdeka) kepada pemerintah Indonesia walaupun Papua telah berintegrasi sejak Pepera tahun 1969. Hal ini pun berkembang ke arah pertentangan dan perbedaan pandangan antara pemerintah dan sebagian masyarakat Papua (Pro Papua Merdeka) terkait di integrasikannya Papua ke dalam RI, yang mana tuntutan pemisahan diri keluar dari NKRI oleh sebagian rakyat Papua tetap terasa hingga kini.

Melihat latar belakang diatas maka menarik untuk dielaborasi lebih jauh :

- a) Mengapa hingga saat ini ada sebagian rakyat Papua yang masih mempermasalahkan proses integrasi Irian Barat (Papua) ke dalam NKRI ?
- b) Faktor-faktor apa saja yang mendasari protes sebagian rakyat Papua terhadap proses integrasi Irian Barat (Papua) ke dalam NKRI ?

Penelitian ini penting dilakukan untuk mendapatkan gambaran terkait sejarah proses integrasinya Irian Barat (Papua) kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), untuk mengetahui mengapa sampai saat ini ada sebagian masyarakat Papua masih mempermasalahkan proses integrasi dimaksud, dan untuk mengetahui apa faktor-faktor atau penyebab yang menjadi dasar masalah sehingga "proses integrasi" yang dimaksud masih dipermasalahkan.

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan secara teoritis, dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan kajian ilmu-ilmu social, dan terlebih khusus kajian disiplin ilmu politik terkait masalah integrasi bangsa (integrasi politik) yang dihadapi negara Indonesia dewasa ini. Sedangkan secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah (pusat) maupun pemerintah daerah provinsi Papua, dalam upaya merumuskan kebijakan-kebijakan strategis terkait penanganan akar masalah yang berhubungan dengan pertentangan pandangan antara pemerintah dan masyarakat Papua, agar mendorong pematapan integrasi politik kearah mewujudkan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif (kualitatif) dengan bentuk pendekatan studi historis. Penggunaan metode penelitian deskriptif (kualitatif) ini dimaksudkan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan (mendeskripsikan) keadaan subjek atau objek penelitian baik seseorang, lembaga, maupun masyarakat berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (alami).

Adapun pendekatan studi historis dalam penelitian ini guna dimaksudkan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fakta-fakta situasi masa lampau guna menemukan sebab-sebab yang telah mempengaruhi perkembangan masa sekarang.

Yang menjadi informan dari penelitian ini diantaranya :

- a. Yan Piter Yarangga (Ketua Dewan Adat Papua Kab. Biak Numfor)
- b. Yohan F. Rumwaropen, S.pd (Kepala Seksi Kelembagaan Anak, Remaja dan Pemuda / Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat)
- c. Pdt. (Emiritus) Zeth Rumere (Mantan Anggota DPR-GR RI / Peserta PEPERA Tahun 1969)
- d. Hugo Rumwaropen (Tokoh Masyarakat Papua / politik dan religius) dan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

➤ **Konferensi Meja Bundar (23 Agustus 1949 - 2 November 1949 di Den Haag Belanda)**

Bila dirunut kebelakang dalam perspektif sejarah, maka salah satu peristiwa penting yang mendasari permasalahan terkait proses integrasi Irian Barat kedalam NKRI adalah terkait perbedaan pandangan antara pihak Indonesia dan Belanda dalam konferensi meja bundar. Konferensi Meja Bundar (KMB) disamping menetapkan soal penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Republik Indonesia Serikat (RIS), juga mengatur soal Irian Barat. Namun fakta menunjukkan bahwa KMB tidak bisa menjadi rujukan yang baik bagi penyelesaian soal Irian Barat. Hal ini asumsinya disebabkan dokumen ataupun hasil KMB tidak mengatur secara eksplisit mengenai status politik Irian Barat.

Sebagai tindak lanjut dari hasil KMB, dalam butir ke 6, pasal 2 perjanjian KMB 1949 menyatakan bahwa "kedudukan Irian Barat akan dirundingkan antara kerajaan Belanda dan Republik Indonesia Serikat (RIS) setahun setelah perundingan". Tindak lanjut perundingan terkait status wilayah Irian Barat dilaksanakan di Jakarta bulan Maret 1950 pada "**Konferensi Uni Indonesia-Belanda**" namun perundingan ini gagal mencapai kesepakatan terkait status Irian Barat. Selanjutnya dalam rangka melanjutkan perundingan tersebut, maka pada bulan Desember tahun 1950, Belanda dan Indonesia menyelenggarakan "**Konferensi Khusus**" di Hague-Belanda, namun baik Indonesia maupun Belanda tidak mendapatkan suatu titik temu kesepakatan dan saling mempertahankan kepentingannya masing-masing, dan yang mana Belanda semakin memantapkan *status quo* nya di Irian dan mempersiapkan pembentukan Irian sebagai sebuah Negara dan kemudian mendeklarasikan kemerdekaan Negara Papua pada tanggal 1 Desember 1961 di Hollandia (Kini Jayapura) melalui KNP (Komite Nasional Papua) dengan nama Negara "*West Papua*", lambing Negara "*Burung Mambruk*", Bendera "*Bintang Kejora*", Lagu Kebangsaan "*Hai Tanahku Papua*" dan Semboyan "*One People One Soul*".

➤ **Trikora (Tiga/Tri Komando Takyat)**

Untuk menghadapi politik dekolonisasi ataupun pembentukan Negara Papua Barat dari pemerintah Belanda, Presiden Soekarno mencetuskan Tri Komando Rakyat (*TRIKORA*) pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta untuk merebut Irian Barat.

Trikora merupakan ajang bagi terciptanya serangan-serangan militer terbatas dari Indonesia terhadap Belanda di Irian Barat pada akhir tahun 1961, sehingga mempercepat proses pencapaian Perjanjian New York antara Indonesia dan Belanda mengenai status Irian Barat.

➤ **New York Agreement**

Berkat dukungan modernisasi perlengkapan militer dari Uni Soviet, Indonesia dengan ABRI (kini TNI) serius melakukan pembebasan Irian Barat dengan melakukan persiapan serangan-serangan militer terbatas terhadap Belanda di Irian yang mengakibatkan konflik antara kedua negara semakin meruncing. Ketegangan antara

Belanda dan Indonesia yang mana Indonesia pada saat itu didukung persenjataan militer Uni Soviet (Blok Timur) berhasil mencuri perhatian Amerika Serikat (Blok Barat).

Amerika Serikat melalui **Elsworth Bunker**, mengajukan usulan kepada PBB mengenai penyelesaian persoalan Irian. Oleh karena tekanan dari Amerika Serikat terhadap Belanda inilah maka Belanda menerima seluruh rumusan dalam usulan Bunker, namun dengan syarat harus memperhatikan hak-hak dan jaminan bagi rakyat Irian. Rumusan itu disepakati pada tanggal 18 Juli 1962.

Pada tanggal 15 Agustus 1962 sesuai dengan usulan Bunker, maka di markas besar PBB New York berhasil ditandatangani sebuah perjanjian antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda yang dikenal dengan "Perjanjian New York (*New York Agreement*)" yang langsung disaksikan oleh Sekretaris Jenderal PBB **U Thant**.

Isi perjanjian ini menyatakan bahwa: Belanda akan menyerahkan kekuasaannya atas Irian Barat kepada Badan Pemerintahan (Peralihan) Sementara PBB yakni *United Nations Temporary Executive Authority* (UNTEA); dan kemudian UNTEA akan menyerahkan kekuasaan atas Irian Barat kepada Indonesia; kemudian sebelum akhir tahun 1969 dengan berada dibawah pengawasan PBB, Indonesia akan melaksanakan suatu *Act of Free Choice* (PEPERA) penentuan nasib sendiri bagi orang Papua/Irian apakah mereka ingin bergabung dengan Indonesia atau berdirisendirisebagai sebuah Negara merdeka

➤ **Selintas Penyelenggaraan *Act Of Free Choice* (PEPERA) Tahun 1969**

Act Of Free Choice atau PEPERAdilaksanakan di Irian dimulai dari Merauke pada tanggal 14 Juli dan berakhir di Jayapura pada tanggal 2 Agustus 1969. PEPERA dilaksanakan di delapan (8) kota di Irian, yakni : Kab.Merauke, Kab.Jayawijaya, Kab.Paniai, Kab.Fak-fak, Kab.Sorong, Kab.Manokwari, Kab.Teluk Cendrawasih, dan terakhir di Kota Jayapura pada tanggal 2 Agustus 1969. Pelaksanaan PEPERA dihadiri oleh utusan PBB **Dr. Fernando Ortiz-Sanz**(Duta Besar dari Bolivia untuk PBB) yang oleh Sekretaris Jenderal PBB **U Thant** ditunjuk untuk menyelenggarakan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan PEPERA di Irian tahun 1969

Dewan Musyawarah PEPERA(Utusan/Perwakilan) yang dipilih oleh pemerintah Indonesia untuk ikut menentukan nasib bangsa Papua atau Irianpada saat itu berjumlah 1025 orang dari total jumlah penduduk yang pada waktu itu berjumlah hampir 815.906 jiwa. Hasil akhir dari PEPERA melalui Dewan Musyawarah PEPERA (DMP) yang berjumlah 1025 orang secara aklamasi menyatakan untuk bergabung dengan Indonesia. Namun disisi lain, selama pelaksanaan PEPERA tersebut, dibeberapa kota sempat diwarnai dengan aksi demonstrasi sebagian masyarakat. Demonstrasi tersebut di pimpin oleh **Herman Wayoi** dan **Permenas Torrey**.

Hasil pelaksanaan PEPERA yang berlangsung didelapan kabupaten dari tanggal 14 Juli sampai dengan 2 Agustus 1969 melalui para wakil atau utusan dan secara bulat menyatakan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak serta merta diterima oleh sebagian warga papua pada saat itu yang hingga kini pun masi terdengar.

Adapun yang menjadi protes terkait PEPERA 1969 adalah sebagai berikut :

- 1) Pasal XVIII ayat d *New York Agreement* mengatur bahwa :*“The Eligibility of all adults, male and female, not foreign national to participate in the act of self-determination to be carried out in accordance with international practice ...”* aturan ini berarti bahwa penentuan nasib sendiri harus dilakukan oleh setiap orang dewasa (perkiraan 600.000 orang dewasa) pria dan wanita yang merupakan penduduk Papua pada saat penandatanganan *New York Agreement*
- 2) Pelaksanaan pepera tidak menggunakan prinsip *“one man one vote”* (satu orang satu suara) atau setiap orang datang dan memberikan suaranya tetapi malah menggunakan prinsip perwakilan/utusan berdasarkan *“musyawarah untuk mufakat”*.
- 3) Diserahkannya administrasi pelaksanaan PEPERA kepada pemerintah Republik Indonesia seperti yang diatur dalam *New York Agreement*, sesungguhnya dianggap sebagai suatu keputusan yang sewenang-wenang serta merupakan sumber utama pelanggaran hak-hak politik dan hak-hak asasi manusia bangsa Papua. Sebagai pihak yang bermasalah, Indonesia tidak patut menjadi penyelenggara Penentuan Nasib Sendiri Bangsa Papua, dan yang seharusnya dipegang oleh pihak ketiga (penengah) yang netral.
- 4) Keterlibatan pihak militer Indonesia pada pelaksanaan PEPERA tidak saja pada intimidasi terhadap penduduk, tetapi militer juga terlibat dalam pengaturan pelaksanaan pepera. Misalnya, surat rahasia komandan korem 172, *Kolonel Blego Soemarto*, No: R – 24/1969, perihal: pengamanannya pepera, tanggal 8 Mei 1969 yang ditujukan kepada Bupati Merauke selaku anggota muspida kabupaten Merauke. Isi surat tersebut antara lain menyatakan: *“apabila pada masa poling tersebut diperlukan adanya penggantian anggota Dewan Musyawarah, pengantiannya supaya dilakukan jauh sebelum musyawarah pepera. Apabila alasan-alasan secara wajar untuk penggantian itu tidak diperoleh, sedang dilain pihak dianggap mutlak bahwa anggota itu perlu diganti karena akan membahayakan kemenangan pepera, harus berani mengambil cara yang tidak wajar untuk menyingkirkan anggota yang bersangkutan dari persidangan pepera sebelum dimulainya sidang demus PEPERA”*. Dibagian lain surat tersebut, komandan korem 172 menginstruksikan bahwa *“sebagai kesimpulan dari surat saya ini adalah bahwa pepera secara mutlak harus kita menangkan, baik secara wajar atau secara tidak wajar”*. Mengingat bahwa wilayah kerja komandan korem 172 termasuk pula kabupaten-kabupaten Jayapura dan Jayawijaya maka patut diduga keras surat rahasia yang isinya kurang lebih sama juga dikirimkan ke bupati-bupati yang lain.

Protes terkait penyelenggaraan PEPERA dan hasil PEPERA seperti diuraikan diatas berimplikasi pada tuntutan pemisahan diri yang mencapai klimaks pada penyelenggaraan Kongres Papua II 2000 pada tanggal 21 Mei – 04 Juni dengan tema : *“Mari Kita Luruskan Sejarah Papua Barat”*. Kongres ini adalah puncak dari pertemuan setiap faksi perjuangan kemerdekaan Papua untuk menentukan kongklusi kongrit terhadap perjuangan orang Papua untuk melepaskan diri dari Indonesia. Tuntutan ini membuat heboh pemerintah Indonesia (Jakarta) dan berupaya menemukan strategi dan solusi bagi meredam eskalasi tuntutan rakyat Papua yang menggema seantero tanah Papua dan juga mendapatkan simpati Internasional

Sehubungan eskalasi tuntutan *“Merdeka”* yang semakin menggema oleh rakyat Papua pada saat itu, maka pada tahun 2001 pemerintah mengeluarkan suatu

produk kebijakan untuk meredam tuntutan pemisahan diri, yaitu UU No 21 tahun 2001, tentang otonomi khusus bagi Papua. Namun produk UU ini tidak serta merta diterima begitu saja oleh kebanyakan masyarakat Papua, karena mereka menganggap bahwa otonomi khusus tidak lain merupakan fase kedua dari Pepera tahun 1969. Bahkan sejak dikeluarkannya UU otsus hingga saat ini, bagi mereka (orang Papua) tidak membawa dampak perubahan yang signifikan kepada kesejahteraan orang Papua, bahkan ada kecenderungan pemikiran bahwa otsus hanya untuk mensejahterakan dan memperkaya segelintir pejabat Papua dan para pejabat Jakarta, otsus identik dengan uang banyak tanpa memiliki substansi penyelesaian bagi masalah dan kesejahteraan orang Papua.

KESIMPULAN

Bila dicermati, Proses Integrasi Irian Barat atau Papua ke dalam NKRI mengalami tantangan yang cukup serius bahkan protes terhadap Integrasi Papua ke dalam NKRI semakin menguat kearah tuntutan pemisahan diri. Alasannya, rakyat Papua merasa tidak dilibatkan dalam proses-proses perundingan yang membahas masa depan wilayahnya.

Ingatan suram pada masa lalu yang diperlakukan secara tidak manusiawi oleh instrumen kekuasaan pemerintah Indonesia dan militernya yang tidak menghargai cita-cita politik mereka, tanah adat, hak ulayat dirampas, sumber daya alam di eksplorasi dan dieksploitasi dan kemudian hasilnya diboyong ke luar negeri, martabat manusia direndahkan dan hak-hak asasi di injak-injak yang tampak dipermukaan sekarang sesungguhnya merupakan stigma masa lalu dan akumulasi dari sejumlah tuntutan dan aspirasi yang telah diperjuangkan sejak integrasi 1 mei 1963

Kecuali itu, bahwa integrasi Irian Barat ke dalam Indonesia merupakan sebuah perjalanan yang sarat konflik dan dugaan rekayasa. Sejarah itu diawali dari Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949 dan berlanjut hingga Perjanjian New York (New York Agreement) 15 Agustus 1962

Tindak lanjut perjanjian tersebut adalah pelaksanaan Act Of Free Choice atau Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969, yang mana Pepera tidak dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip universal yang menggunakan sistem *One Man One Vote* (satu orang satu suara) tetapi melalui sistem perwakilan yang melibatkan 1025 tokoh masyarakat Papua yang dipilih dan ditentukan oleh Indonesia dalam Dewan Musyawarah Pepera (DMP) yang mewakili 815.906 penduduk saat itu

Disinilah letak kecurigaan rakyat, telah terjadi manipulasi dan rekayasa aspirasi didalam pelaksanaan Pepera yang tidak sesuai dengan pasal 18 Perjanjian New York (*one man one vote*), sehingga legitimasi Pepera diragukan. Tak dapat dipungkiri bahwa perjuangan rakyat Papua ini telah menimbulkan polemik terbuka tentang urgensi mempertahankan sistem NKRI. Namun, polemik yang terjadi dan melibatkan sejumlah tokoh intelektual tidak mampu menyentuh bagian terdalam dari aspirasi dan tuntutan yang diperjuangkan rakyat Papua

Kenyataan membuktikan bahwa lapisan terbesar dari rakyat Indonesia dan para pelaksana pemerintah Negara ini cenderung memandang keinginan aspirasi dan tuntutan rakyat Papua untuk memisahkan diri dari RI hanya dalam perspektif politik yang sangat dangkal. Ekseksnya, keinginan, aspirasi dan tuntutan rakyat Papua untuk memisahkan diri dari RI hanya dilihat sebagai geakan separatis yang ingin memecah-bela integrasi bangsa. Penggunaan perspektif semacam itu sangat keliru dan bahkan menyesatkan, sebab kemudian yang terjadi adalah menyederhanakan persoalan yang

sebenarnya justru sesuatu yang menjadi factor pendorong untuk bersemangat memisahkan diri dari RI.

Fakta membuktikan bahwa pembangunan Indonesia telah mencatat Irian (Papua) memberikan sumbangan besar bagi kemajuan bangsa. Sumber daya alam yang dimilikinya (emas,minyak,tembaga,nikel,kayu dan sebagainya) dieksploitasi dan hasilnya dimanfaatkan untuk membiayai program pembangunan nasional. Permasalahannya, apa yang diberikan negara kepada rakyat Papua setelah Papua memberikan sumbangan hak miliknya untuk Negara dan seluruh rakyat Indonesia ?Kenyataan menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu rakyat Papua tetap hidup dalam kemiskinan, kemelaratan dan keterbelakangan.Strategi pembangunan nasional ternyata tidak mampu menjadikan rakyat Papua sebagai kelompok social yang harus ikut dibangun kemampuan ekonomi dan intelektualnya namun justru sebaliknya.

Sejumlah fakta dan data telah diungkapkan dan semuanya mengisyaratkan satu hal : rakyat Papua tidak dipandang sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat. Fakta membuktikan bahwa aspek kesejahteraan jauh dibawah standar selama berintegrasi dengan Indonesia. Pemerintah Indonesia Lupa bahwa emas,tembaga, minyak yang dijual untuk memperoleh devisa bagi Negara berasal dari bumi Papua. Bahwa rakyat diwilayah ini masih hidup dalam kemiskinan sudah menjadi pengetahuan umum.Otonomi khusus dalam kenyataannya semenjak dikeluarkan pada tahun 2001 tidak memberikan dampak nyata yang signifikan yang dapat digunakan sebagai indikator penilaian keberhasilan terhadap pemerintah dalam menyikapi permasalahan Papua.

Pengabaian aspek kesejahteraan rakyat ini semakin diperparah oleh berbagai tindakan kejahatan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan (TNI).Pendekatan keamanan yang ekstra represif telah menewaskan ratusan ribu rakyat Papua.

Dengan dalih memberantas GPK/OPM , rakyat dibantai dan disiksa. Kasus Manokwari tahun 1965, Wamena (Jayawijaya) tahun 1977, Biak tahun 1980-an dan 1998, Sarmi (Jayapura) tahun 1992, Timika tahun 1995. Pelanggaran Ham di Bella,Jila,Alama dan Mapenduma tahun 1998 dan Sorong tahun 1998. Banyak anak-anak mejadi yatim piatu akibat ayahnya menjadi korban pembunuhan dan ibu-ibu muda menjadi janda karena suami mereka dibunuh dengan label GPK/OPM tanpa melalui prosedur hukum dan penyelesaiannya.

Untuk itulah keputusan menggelar forum dialog melalui Kongres Rakyat Papua (KRP) dengan melibatkan semua unsur terkait dikalangan masyarakat dan pemerintah yang baru saja berakhir di Jayapura (Numbai) mempunyai makna strategis. Strategis karena, lewat forum dialog KRP dapat mengungkapkan aspirasi, perasaan dan keinginan serta kehendak politiknya kepada presiden RI, sekaligus mendekonstruksi atau meluruskan sejarah tentang proses awal integrasi Papua kedalam NKRI yang dinilai telah banyak mengalami distorsi.

Kecuali itu, pemerintah mestinya memiliki keberanian untuk menguji kembali akurasi dan validitas dari catatan sejarah tentang integrasi Irian Barat ke dalam NKRI. Urgensi untuk menguji kebenaran sejarah ini sangat tinggi karena diluar catatan sejarah yang resmi diakui pemerintah ada versi lain yang fakta-faktanya justru bertolak belakang dengan fakta versi pemerintah.

Dari cermin masa lalu itu, maka melalui tulisan ini disarankan agar kedepan seyogyanya program-program kegiatan pembangunan yang direncanakan di Papua, hendaknya berorientasi pada budaya masyarakat setempat. Pemikiran ini diharapkan sebagai salah satu alternatif mengeliminir munculnya berbagai gejala di daerah itu. Pesan ini seharusnya dapat diwujudkan setelah Papua berintegrasi dengan Indonesia,

namun di masa lalu karena dengan pendekatan militer, maka makna integrasi bagi orang Papua nampaknya masih jauh dari harapan.

Seruan ini tidak berlebihan apabila dijadikan acuan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di Papua. Jika tidak, maka apa yang dilaksanakan bukan lebih mempererat persatuan dan kesatuan orang Papua dalam NKRI, tetapi menciptakan perasaan kurang puas dan bahkan tidak percaya kepada pemerintah. Namun demikian ada sedikit harapan bahwa tidak ada perilaku manusia yang tidak dapat diubah, karena itu perilaku pemerintah yang kurang memperhatikan masyarakat Papua dan militer dimasa lalu yang berdampak pada munculnya berbagai gejala dari masyarakat di Papua, diyakini dapat berubah. Perubahan itu dapat terjadi apabila adanya saling menghormati dan menghargai hak-hak masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat Papua. Kemudian, marilah pemerintah serius dalam mengawasi jalannya Otonomi khusus Papua sehingga rakyat Papua merasa bahwa pemerintah memperhatikan nasib mereka dan seiring berjalannya waktu diyakini dapat mengubah orientasi tuntutan Papua merdeka kepada NKRI.

DAFTAR PUSTAKA

AluaA.Agus (2006), *Papua Barat Dari Pangkuanke Pangkuan* :sesuai ikhtisari – seri pendidikan politik Papua No.1 : Jayapura; Penerbit : Sekretariat Presidium Dewan Papua Dan Biro Penelitian STTF Fajar Timur.

_____ (2002), Dialog Nasional Papua Dan Indonesia 26 Februari 1999, Kembalikan Kedaulatan Papua Barat, Pulang Dan Renungkan Dulu – Seri Pendidikan Politik Papua No.2 : Jayapura : Penerbit : Jayapura : Sekretariat Presidium Dewan Papua Dan Biro Penelitian STTF FajarTimur

AsriK.Deni (2006), Kamus Istilah Politikdan Kewarganegaraan, Bandung ;Penerbit : CV.YRAMA WIDYA, Sinar Harapan

Antoh, Demmy (2007), Rekonstruksi Dan Transformasi Nasionalisme Papua, Jakarta ; Penerbit : Gama Global Media

Andrianto Taufiq Tuhana (2001), Mengapa Papua Bergolak ?: Yogyakarta; Penerbit : Gama Global Media

Api Perjuangan Pembebasan Irian Barat (1989), Yayasan Badan Kontak Keluarga Besar Perintis Irian Barat

Bahar A. Safroedin (t.th), Integrasi Nasional Teori, Masalah Irian Barat, Masalah Dan Strategi ;Penerbit: Galia Indonesia

Bhakti, Ikrar Nusa, Intervensi Amerika Dalam Penyelesaian Masalah Irian Barat, Masalah-masalah Internasional Masa Kini, No.13 (Jakarta : LRKN-LIPI,1985)

_____, Aspek – Aspek Internasional Dalam Integrasi Nasional :Suatu Tujuan Empiris Atas Kasus Irian Jaya,(Analisis CSIS No.5 Thn XXIII,1994)

- Cholil,M (1997), Sejarah Operasi-Operasi Pembebasan Irian Barat ; Jakarta : Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sejarah ABRI
- Djopari,R.G,John (1993), Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka ; Jakarta : PT.Gramedia Widiasarana Indonesia
- Elisabeth, Adriana, Dimensi Internasional Kasus Papua. Vol.3 No.1 /2006, "Papua Menggugat", Jurnal Penelitian Politik, LIPI
- Erari, Phil Karel (1999), Tanah Kita Hidup Kita, Hubungan Manusia Dan Tanah Di Irian Jaya Sebagai Persoalan Teologis ; Jakarta ; Penerbit : Pustaka Sinar Harapan
- Efrisa (2008), Ilmu Politik : Dari Ilmu Politik Sampai Sistem Pemerintahan ; Bandung; Penerbit : ALFABETA Anggota IKAPI
- Garnaut Ross Dan Chris Manning (1997), Perubahan Sosial Ekonomi Di Irian Jaya; Jakarta:PT. Gramedia
- Glay, Benni(2000), Menuju Papua Baru: Beberapa Pokok Pikiran Sekitar Emansipasi Orang-Orang Papua : Waena-Jayapura: Penerbit ; Deiyai
- Hamid, H.Zukifikfli (1996), Politik Di Melanesia ; Jakarta : Penerbit : Pustaka Jaya
- Hariwijaya M dan Djaelani M. Bisri (2004), Teknik Menulis Skripsi Dan Thesis- Landasan Teori Hipotesis, Analisi Data, Kesimpulan.Jogyakarta : Zenith Publisher
- Ismail A. et.al.,(2009), Praja Grubta Vira, Ksatria Pelindung Rakyat, Rakyat Irian Dari Massa ke Masa. Jayapura :Dinas Sejarah Militer Kodam XVIII/Cenderawasih
- Koentjaraningrat dan Harsya W. Bachtiar,et.al.,(1963), Penduduk Irian Barat. Jakarta : Sari Monograpi, LIPI
- Kartodirdjo, Sartono(1989), Kolonialisme dan Nasionalisme di Indonesia Pada Abad 19 dan Abad 20. Lembaran Sedjarah No.8.Yogyakarta :Seksi Penelitian Jurusan Sejarah Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjadarda University
- Khons Hans (1989), Nasionalisme, Arti dan Sejarahnya. Sumantri Merdipura (Penerjemah), Jakarta : Erlangga
- Kerebungu Ferdinand (2008), Pengkajian Informasi Potensi Konflik dan Integrasi Bangsa. Malang : Wineka Media
- Leirissa R.Z, et.al (2009), Sejarah Proses Integrasi Irian Jaya, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional
- Jurnal Penelitian Politik, Vol.2 No.1/2005 : Jakarta, LIPI Press
- Jurnal Politika, Pencerahan Politik Untuk Demokrasi, Vol.1 No.2 Agustus 2005